

Kolaborasi Model Pentahelix Dalam Kebijakan Pengembangan Industri Pariwisata Di Kabupaten Pesawaran

Dian Kagungan¹, Noverman Duadji², Intan Fitri Meutia³

^{1,2,3} Dosen jurusan Administrasi Negara FISIP Universitas Lampung

Email : dian.kagungan@fisip.unila.ac.id

ABSTRACT

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan model kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data primer dipetik melalui wawancara dan fgd terhadap *key informan* yang relevan dengan kajian penelitian ini. Kolaborasi model pentahelix dalam pengembangan pariwisata desa wisata Harapan Jaya di lihat dari parameter keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan desa wisata Harapan Jaya dan menciptakan nilai tambah produk wisata yang menggambarkan karakteristik ciri khas atas keunikan produk dari desa wisata berbasis agrowisata tersebut. Karakteristik ciri khas produk pariwisata yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan potensi desa wisatanya antara lain perkebunan kopi, pertanian dan produk kuliner lokal (*home industry*).

Hasil dan rekomendasi yang penting dari penelitian ini adalah kolaborasi model *Pentahelix* dalam pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya perlu mendapatkan perhatian khusus, dan kurangnya komunikasi antar aktor mengenai desa wisata Harapan Jaya. Rendahnya kemampuan pendanaan dan manajemen serta kreativitas SDM yang terampil dalam mengupayakan pembuatan produk-produk industri lokal kepariwisataan terutama menyangkut industri kerajinan tangan dan cendera mata juga mempengaruhi tingkat kurang optimalnya kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata Harapan Jaya.

Namun demikian sejauh ini hadirnya desa wisata juga membawa dampak yang positif, pembukaan lapangan kerja baru, pelestarian lingkungan dengan kawasan yang masih asri, sejauh ini pengembangan Desa Wisata Harapan jaya sepenuhnya menjual keasrian alam lokalnya antara lain wisata alam air terjun, dan bumi perkemahan sebagai daya tarik dari kawasan tersebut. Oleh karena itu, pentingnya kolaborasi Model *Pentahelix*, dengan adanyaketerlibatan Akademisi, Swasta, Komunitas, Pemerintah dan Media sangat lah penting untuk menunjang wisata ke depannya, namun sejauh ini untuk kerjasama tersebut masih belum optimal di ukur dari saling ketergantungan antar aktor, penyatuan pemikiran secara konstruktif, keputusan bersama, dan tanggung jawab bersama, hanya pihak-pihak tertentu saja yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, sehingga pentingnya ada perjanjian ataupun regulasi khusus untuk mengatur komponen-komponen tersebut bisa bekerjasama secara resmi dalam mengupayakan kolaborasi Model *Pentahelix* dalam pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya

Key words: kolaborasi, model pentahelix, pariwisata, Pesawaran

Pendahuluan

Pembangunan pariwisata di Propinsi Lampung tidak selesai jika berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, masyarakat dan *media* harus saling *bersinergi*, sehingga potensi pariwisata dapat tergarap dengan maksimal. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersama membangun pariwisata Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi lintas sektor sebagai upaya membangun pariwisata Lampung, dengan kata lain kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Propinsi Lampung sangatlah penting.

Peran penting Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan didasarkan bahwa pada pemikiran bahwa birokrasi memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat suatu negara. Birokrasi juga berperan penting dalam melakukan berbagai tindakan antisipatif untuk meminimalisasi berbagai dampak negatif, mengingat banyaknya potensi persoalan yang muncul dari kepariwisataan

Peran stakeholder terhadap pembangunan kepariwisataan juga tidak bisa diabaikan begitu saja dalam kebijakan pengembangan pariwisata di Indonesia melalui kegiatan pemberdayaan yang dilakukan, tidak terkecuali proses kolaboratif tata kelola pariwisata di Kabupaten Pesawaran, Propinsi Lampung. Proses tatakelola pariwisata merupakan suatu proses ***adaptive system, dan beorientasi pada konsensus***. Berbasis 2 pakar, yaitu : Anshell dan Gash (2008) memetakan proses kolaboratif yang dimulai dari adanya dialog secara tatap muka (***face to face dialogue***), membangun kepercayaan (***trust building***), membangun komitmen terhadap proses (***commitment to the process***), berbagi pemahaman (***shared understanding***), kemudian terbentuknya hasil sementara (***intermediate outcome***)

Kolaborasi model pentahelix dalam pengembangan pariwisata desa wisata di lihat dari parameter keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan desa wisata. Proses kolaboratif pariwisata dan tatakelola pariwisata, diasumsikan akan terjadi jika terpenuhinya beberapa syarat, (i). Terdapat partisipasi para pemangku kepentingan. Partisipasi sebenarnya adalah *citizen power*, (menurut Arnstein) (ii). Terdapat kondisi dimana ada kesetaraan kekuasaan, berarti tidak ada dominasi tertentu, setiap aktor yang berdialog tidak dihalangi oleh batas hirarki dan terdapat rasa saling menghormati (iii). Terdapat aktor-aktor yang kompeten

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : bagaimakah kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran?

Tujuan jangka panjang penelitian ini adalah menghasilkan model kolaborasi pentahelix dalam pengembangan pariwisata di desa wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran yang menjadi lokasi penelitian ini.

Manfaat penelitian ini adalah : meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Kabupaten Pesawaran tepatnya di desa Harapan Jaya, Kecamatan Way Ratay

Tinjauan Pustaka

1.1 Konsep Kebijakan Pembangunan Kepariwisata

Dalam kehidupan di negara moderen saat ini, kegiatan pembangunan termasuk pembangunan kepariwisataan tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya sebuah kebijakan yang baik pula. Kebijakan yang baik dapat diilustrasikan seperti seorang diRigen yang mengatur permainan sebuah orkestra yang terdiri dari banyak pemain musik dengan jenis alat musik yang berbeda-beda jenis, suara, dan waktu memainkannya, sehingga menghasilkan sebuah lagu yang sangat indah. Dengan demikian setiap insan pariwisata, dan terlebih lagi para birokrat, baik di lingkungan Pemerintah maupun Pemerintahan daerah, harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang baik dalam kepariwisataan.

Ditinjau dari aspek kebutuhan praktis, pembahasan tentang teori-teori yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan seringkali tidak terlalu dipikirkan. Orang yang mendengar istilah "kebijakan pembangunan kepariwisataan" pada umumnya secara otomatis akan memfokuskan perhatiannya terhadap aktivitas yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam penggolongan kepariwisataan. Namun demikian, beberapa teori terkait dengan konsep dimaksud perlu diungkapkan dalam tulisan ini karena membantu memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai aktivitas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah daerah dalam pengelolaan kepariwisataan. Ketika kita berbicara mengenai masalah kebijakan pembangunan kepariwisataan, maka perlu dibahas terlebih dahulu pengertian istilah "kebijakan" dan "pembangunan". Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam jaringan, istilah "kebijakan" didefinisikan sebagai:

"(1) kepandaian; kemahiran; kebijaksanaan; (2) rangkaian konsep dan asas yang menjad garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tt pemeritahan ,organisasi, dsb); pernyataan cita-cita ,tujuan, prinsip, atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran; garis haluan."

Sementara itu dalam Kamus Merriam-webster, istilah "*policy*" yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai "kebijakan" ,diartikan sebagai aturan atau ide secara resmi di akui sebagai pedoman untuk menentukan pelaksanaan aktivitas: "*an offycially accepeted set of rules or idieas about what should be done*". Dengan demikian istilah "*policy*" atau "kebijakan" (khususnya definisi nommer 2) pada prinsipnya adalah parameter yang dijadikan dasar atau pedoman untuk melaksanakamn sebuah aktivitas. Perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah bahwa tidak dijelaskan secara tegas apakah "kebijakan" juga meliputi perturan perundang-undangan. Hal tersebut berbeda dengan istilah "*policy*" yang lebih jelas pengertiannya.

Definisi sederhana lainnya mengenai istilah tersebut adalah arah tindakan atau cara bertindak dipilih dari berbagai alternatif dengan mempertimbangkan kondisi faktual, yang menentukan pengambilan keputusan dimasa kini dan masa depan: *"A definite course or method of action selected from among alternatives and in the light on given conditions to guide and determine present and future decisions"*. Dalam hubungannya dengan tugas pemerintahan, menurut Edgell dan Swanson (2013), pemahaman mengenai kebijakan dibidang kepariwisataan akan menjadi lebih mudah jika dimulai dari definisi Thomas Dye mengenai "kebijakan publik", yaitu tindakan apapun melakukan atau tidak melakukan yang dipilih oleh pemerintah: *"whatever government choose to do or not to do"*.

Sementara itu, istilah "pembangunan" diartikan sebagai suatu proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa (Sasmojo, 2004 : 1), tentunya ke arah yang lebih baik. Jika kemudian dikaitkan dengan kedua istilah tersebut dan istilah "kebijakan publik", maka "kebijakan pembangunan" akan memiliki pengertian sebagai *parameter yang secara resmi diakui yang dijadikan sebagai dasar atau pedoman oleh Pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi terwujudnya proses perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa ke arah yang lebih baik*.

Dalam bidang kepariwisataan, dikenal pula istilah dalam bahasa Inggris yaitu *"tourism policy"*. Menurut Goeldner dan Ritchie (2009:414), istilah tersebut didefinisikan sebagai berikut:

"Tourism policy can be defined as a set of regulations, rules, guidelines, directives, and development/promotion objectives and strategies that provide a framework within which the collective and individual decisions directly affecting long-term tourism development and the daily activities within a destination are taken".

Pendapat lain mengenai istilah ini diungkapkan pula oleh Paul S. Biederman (2008) didalam buku yang berjudul *Travel and Tourism: An Industry Primer*, yang menambahkan aspek sosial didalam kebijakan kepariwisataan:

"A tourism policy defines the direction or course of action that a particular country, region, locality, or an individual destination plans to take when developing or promoting tourism. The key principle for any tourism policy is that it should ensure that the nation (region or locality) would benefit to the maximum extent possible from the economic and social contributions of tourism. The ultimate objective of tourism policy is to improve the progress of the nation (region or locality) and the lives of its citizens."

Kedua definisi tersebut diatas memberikan gambaran bahwa yang dimaksud dengan *tourism policy* atau yang penulis terjemahkan sebagai "kebijakan dibidang kepariwisataan" adalah berbagai macam aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata yang menjadi pedoman bagi pengambilan keputusan dalam jangka pendek dan panjang. Kebijakan ini harus memberikan jaminan bahwa tujuan utamanya adalah membuat masyarakat yang bersangkutan yang tinggal didestinasai pariwisata memperoleh keuntungan optimal dari kontribusi kepariwisataan dibidang sosial dan ekonomi dalam bentuk

kemajuan dan kualitas hidup. Jika dikaitkan dengan konsep pembangunan, maka berarti aturan, strategi dan sasaran pembangunan atau promosi pariwisata tersebut harus mengarah kepada perubahan yang didasarkan kepada keinginan suatu masyarakat bangsa.

Edgell dan Swanson (2013) berpendapat bahwa pada intinya kebijakan dibidang kepariwisataan adalah setiap tindakan pemerintah baik di bidang legislatif, administratif, maupun yudisial yang berpengaruh terhadap kepariwisataan. Termasuk di dalamnya adalah aktivitas pemasaran, perencanaan dan keberlanjutan. Menurut mereka bentuk kebijakan tersebut adalah berbagai pedoman (aturan), prinsip dan prosedur, yang disusun secara etis dan sifatnya fokus terhadap suatu persoalan serta mewakili harapan suatu masyarakat (atau bangsa) dalam hubungannya dengan aspek perencanaan, pembangunan, produk, jasa, pemasaran dan aspek keberlanjutannya.

1.2 Konsep Sinergitas

Najiyati dan Rahmat dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan sinergi sebagai kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar dari sebelumnya. Jadi sinergi dapat dipahami pula sebagai operasi gabungan atau perpaduan unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Covey dalam Kurniawan & Suryawati (2017:40) mendefinisikan sinergitas sebagai sebuah kombinasi antar unsur maupun antar bagian yang akan memperoleh keluaran yang lebih baik dari sebelumnya. Indikator dalam menganalisis sinergitas menurut pendapat doctoroff meliputi indikator komunikasi yang efektif, umpan balik yang cepat, kepercayaan, serta kreativitas antar pihak terkait yang menjadi syarat utama bagi sebuah sistem sinergi yang ideal

Sofyandi & Garniwa dalam Rahmawati dkk (2014:643) mengemukakan bahwa Sinergitas dapat terbangun dengan baik melalui dua cara diantaranya

1. Komunikasi yang berorientasi pada sumber yang memandang bahwa komunikasi sebagai kegiatan dengan seseorang (sumber) secara sungguh-sungguh memindahkan stimuli guna mendapatkan tanggapan, dan komunikasi yang berorientasi pada penerima yang memandang komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.

2. Koordinasi

Komunikasi tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya koordinasi. Dalam hal ini Silalahi dalam Rahmawati dkk (2014:643) mendefinisikan koordinasi sebagai bentuk integrasi dari kegiatan-kegiatan individual dan unit-unit ke dalam sebuah usaha bersama yaitu bekerja kearah tujuan bersama.

Moekijat dalam Rahmawati dkk (2014:643) menyebutkan terdapat 9 (sembilan) syarat utama dalam mewujudkan koordinasi yang efektif, yaitu

- 1 Hubungan langsung yang akan mempermudah pencapaian melalui hubungan pribadi secara langsung
- 2 Kesempatan awal dalam tingkat-tingkat awal perencanaan dan pembuatan kebijaksanaan.

- 3 Kontinuitas koordinasi yang harus berlangsung pada semua waktu mulai dari tahap perencanaan
- 4 Dinamisme, koordinasi harus terus menerus
- 5 Tujuan yang jelas untuk memperoleh koordinasi yang efektif.
- 6 Organisasi yang sederhana untuk memudahkan koordinasi yang efektif.
- 7 Perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas yang akan mengurangi pertentangan di antara pegawai-pegawai yang berlainan serta membantu dalam hal pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
- 8 Komunikasi yang efektif
- 9 Kepemimpinan supervisi yang efektif yang akan menjamin koordinasi kegiatan baik pada tingkat perencanaan maupun pada tingkat evaluasi.

Sinergitas dalam pencapaian tujuan dapat terlaksana melalui komunikasi dan koordinasi yang baik. Konsep sinergitas merupakan upaya yang harus dilakukan dalam melaksanakan sistem pemerintahan maupun non pemerintahan baik tingkat pusat maupun tingkat daerah.

1.3 Konsep Model Pentahelix

Model pentahelix pertama kali dicanangkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Arief Yahya yang kemudian dituangkan ke dalam Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan bahwa untuk menciptakan, memastikan kualitas aktivitas, fasilitas, pelayanan, dan untuk menciptakan pengalaman dan nilai manfaat kepariwisataan agar memberikan keuntungan dan manfaat pada masyarakat dan lingkungan, maka diperlukan pendorong sistem kepariwisataan melalui optimasi peran pengusaha, pemerintah, masyarakat/komunitas, akademisi dan media.

Kotler et al dalam Saputri (2020:24) menyatakan bahwa destinasi wisata akan mendapatkan sebuah keunggulan dalam bersaing apabila masing-masing dari organisasi yang terlibat dapat berbagi pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sumber daya lain yang dapat mendukung proses pengembangan pariwisata. Dalam hal ini model pentahelix berfokus pada 5 unsur yang menjadi penunjang dalam pelaksanaan pembangunan pariwisata diantaranya pemerintah sebagai pembuat kebijakan, akademisi sebagai transfer pengetahuan dan penelitian terkait, masyarakat atau komunitas sebagai kekuatan sosial, pengusaha sebagai kekuatan dalam mekanisme pasar serta media sebagai alat promosi objek wisata tersebut.

1.4 Peran Aktor Pentahelix

Pengelolaan sektor pariwisata tidak terlepas dari peran stakeholder dalam proses pengembangannya. Terdapat 5 (lima) aktor yang ikut berkontribusi secara aktif dalam proses pengembangan sektor pariwisata, diantaranya

a. Pemerintah

Dalam proses pengembangan sektor pariwisata, pemerintah berperan dalam proses penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung perkembangan pariwisata, menyiapkan kebijakan maupun peraturan yang berkaitan dengan sektor pariwisata, memberikan fasilitas yang memadai dan melakukan kegiatan promosi serta pemasaran destinasi wisata tersebut. Peran

pemerintah dalam pembuat kebijakan maupun regulasi dibidang pariwisata akan mempengaruhi proses pengembangan pariwisata tersebut. Pemerintah juga berperan secara langsung didalam pengembangan regulasi dibidang pariwisata, mengendalikan proses pengembangan pariwisata, serta berperan langsung dalam memperkuat kelembagaan dalam upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas dalam merumuskan kebijakan atau regulasi.

b. Akademisi

Akademisi dalam proses pengembangan pariwisata berperan dengan melakukan kajian ilmiah serta berbagai riset dan pengabdian masyarakat yang terkait dengan pengembangan sektor pariwisata di suatu daerah. Hasil dari kajian ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilakukan para akademisi dapat dimanfaatkan untuk penunjang keberhasilan sektor pariwisata dengan melakukan kerjasama serta komunikasi dengan para akademisi dalam proses pengembangan agrowisata.

c. Dunia usaha

Dalam proses pengembangan pariwisata, dunia usaha atau swasta berperan penting dalam penyelenggaraan bisnis disektor pariwisata yang mengutamakan etika bisnis, profesional, bertanggung jawab serta berkelanjutan. Dunia usaha berperan sebagai *profit oriented* yang akan bertanggungjawab dalam keberlanjutan lingkungan sebagai hal yang sangat penting dalam sektor pariwisata.

d. Komunitas

Komunitas dalam proses pengembangan pariwisata terdiri dari masyarakat dan LSM atau NGO yang berperan mendukung sapa pesona dengan menyediakan jasa pariwisata atau ekonomi kreatif. Masyarakat merupakan objek sekaligus subjek dalam proses pengembangan pariwisata.

e. Media

Media berperan pada bidang informasi dan promosi pariwisata. Promosi dan pemasaran bidang pariwisata yang bersifat inklusif dengan memanfaatkan media sosial.

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, data primer dipetik melalui wawancara dan fgd terhadap *key informan* yang relevan dengan kajian penelitian ini. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data sampai dengan penarikan kesimpulan. Kolaborasi model pentahelix dalam pengembangan pariwisata desa wisata Harapan Jaya di lihat dari parameter keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan desa wisata Harapan Jaya dan menciptakan nilai tambah produk wisata yang menggambarkan karakteristik ciri

khas atas keunikan produk dari desa wisata berbasis agrowisata tersebut. Karakteristik ciri khas produk pariwisata yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan potensi desa wisatanya antara lain perkebunan kopi, pertanian dan produk kuliner lokal (*home industry*).

Hasil dan Pembahasan

Pembangunan pariwisata di Propinsi Lampung tidak selesai jika berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah, pelaku usaha pariwisata, perguruan tinggi, masyarakat dan *media* harus saling *bersinergi*, sehingga potensi pariwisata dapat tergarap dengan maksimal. Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Propinsi Lampung mengajak semua pihak untuk bersama membangun pariwisata Lampung, dan Pemerintah Propinsi Lampung telah membentuk Tim Koordinasi lintas sektor sebagai upaya membangun pariwisata Lampung, dengan kata lain kolaborasi antar aktor pentahelix dalam kebijakan pengembangan industri pariwisata di Propinsi Lampung sangatlah penting.

Peran penting Pemerintah dan pemerintah daerah dalam bidang kepariwisataan didasarkan pada pemikiran bahwa birokrasi memiliki kekuasaan untuk memutuskan segala hal berkaitan dengan kelangsungan hidup masyarakat suatu negara. Birokrasi juga berperan penting dalam melakukan berbagai tindakan antisipatif untuk meminimalisasi berbagai dampak negatif, mengingat banyaknya potensi persoalan yang muncul dari kepariwisataan. Penelitian tahun ke tiga ini mengambil lokasi di Kabupaten Pesawaran tepatnya di Desa Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay.

Gambaran Umum Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran

Kecamatan Way Ratai merupakan salah satu kecamatan yang terletak di sebelah barat Kabupaten Pesawaran memiliki jarak rata-rata 40,32 km dari ibukota Kabupaten Pesawaran. Secara geografis terletak di sebelah selatan Provinsi Lampung dengan sebagian wilayah berupa perbukitan, dataran landai, dan pesisir pantai. Sejak diresmikannya pada tanggal 2 November 2007 berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2007 di Kabupaten Pesawaran memiliki 11 kecamatan dan 114 desa.

Pesawaran merupakan kabupaten kesebelas yang ada di Provinsi Lampung terbentuk pada Tahun 2007 berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2007. Kabupaten Pesawaran beribukota di Gedong Tataan, memiliki jarak 27 km dari Bandar Lampung. Pesawaran memiliki 11 kecamatan dan 144 desa. Kecamatan Way Ratai adalah salah satu bagian dari wilayah Kabupaten Pesawaran. Sebelah utara Kecamatan Way Ratai berbatasan dengan Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran. Sebelah Selatan berbatas dengan Kecamatan Gedong tataan Kabupaten Pesawaran. Sebelah Timur berbatas dengan Kecamatan Padang Cermin. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus. Sebagian wilayah Kecamatan Way Ratai merupakan daerah dataran rendah, sebagian lagi merupakan daerah bukit dan dengan luas total kecamatan sebesar 127.21 Km². Kecamatan Way Ratai beribukota di Desa Wates Way Ratai yang berjarak 41 Km dari ibukota Kabupaten Pesawaran. Desa Wates Way Ratai memiliki luas wilayah terkecil yaitu sebesar 21,56 km².

Kecamatan Way Ratai salah satu daerah berkembang yang menjadi sorotan pemerintah karena banyak terdapat potensi wilayah yang dapat dikembangkan dan menjadi keunggulan daerah. diantaranya menjadi daerah wisata, daerah komoditi pertanian, perkebunan dan perikanan air tawar. Menjadi daerah pengembangan baru menyebabkan RT dan dusun di Kecamatan Way Ratai mengalami perubahan sehingga pada tahun 2019 sampai sekarang terdapat 206 RT dan 72 dusun (*BPS: Statistik Daerah Way Ratai Tahun 2020*).

Kecamatan Way Ratai adalah salah satu daerah berkembang yang menjadi sorotan pemerintah. Menjadi daerah pengembangan baru menyebabkan RT dan dusun di Kecamatan Way Ratai mengalami perubahan sehingga pada tahun 2014 sampai sekarang terdapat 206 RT dan 72 Dusun (*BPS: Statistik Daerah Way Ratai Tahun 2016*). Berdasarkan letaknya, Kecamatan Way Ratai sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedondong, bagian selatan dengan Kecamatan Gedong Tataan, bagian barat dengan Kecamatan Kelumbayan, dan bagian timur dengan Kecamatan Padang Cermin (*BPS: Peta Administrasi Kec. Way Ratai*).

Berdasarkan letaknya, Kecamatan Way Ratai sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kedondong, bagian selatan dengan Kecamatan Gedong Tataan, bagian barat dengan Kecamatan Kelumbayan, bagian timur dengan Kecamatan Padang Cermin (*BPS: Peta Administrasi Kec. Way Ratai*). Dengan karakteristik wilayah yang morfologinya kebanyakan berupa perbukitan dan wilayah hutan, maka masih banyak terdapat hutan kawasan dan hutan lindung. Wilayah tutupan lahan hutan yang masih alami berbatasan dengan Kecamatan Way Ratai yakni kawasan Taman Hutan Wan Abdurahman.

Kecamatan Way Ratai terdapat desa swadaya Desa Harapan Jaya yang terletak dekat dengan kawasan hutan lindung dengan curah hujan tahunan $\pm 2500-3000$ mm, berada di ketinggian lebih dari 500 mdpl dengan topografi perbukitan berlereng-lereng didominasi lereng terjal sehingga perkembangan permukiman penduduk berpola menyebar dan memiliki luas ± 15 km² terdiri dari 8 dusun dan 17 RT, Desa Harapan Jaya terletak cukup jauh dari Ibukota Kabupaten Pesawaran (± 70 km) dengan akses jalan sebagian besar berupa tanah berbatu sehingga menjadikan desa ini sedikit sulit mengalami perkembangan baik dari segi sosial maupun ekonomi. Jumlah penduduk yang tinggal di desa Harapan Jaya tergolong sedang yakni 1.520 jiwa penduduk laki-laki dan 1.325 penduduk perempuan (*BPS Kab. Pesawaran Tahun 2020*). Bila dilihat berdasarkan jenis kelamin, hasil proyeksi penduduk tahun 2015 menunjukkan bahwa Desa Harapan Jaya memiliki angka rasio jenis kelamin tertinggisebesar 114,72.

Masyarakat yang tinggal Desa Harapan Jaya banyak yang bekerja di sektor perkebunan dengan mengolah lahan di lereng perbukitan untuk ditanami tanaman pangan seperti jagung, ubi, kedelai, dan padi. Sistem tanam dan olah tanah masyarakat Desa Harapan Jaya masih tradisional karena pendidikan masyarakatnya yang masih berada dijenjang pendidikan dasar, terbatasnya sarana-prasarana serta kurangnya pengetahuan tentang teknologi. Dari tahun 2015-2020 terdapat kenaikan angka banyaknya anak yang bersekolah SD (4,22%) tetapi angka banyaknya anak bersekolah SLTP dan SLTA justru mengalami penurunan masing-masing 6,36% dan 2,29% (*Cabdin Pendidikan Kec. Way Ratai*).

Secara administratif sebaran spasial Desa Harapan Jaya dengan wilayah lain,

adalah:

1. Sebelah utara berbatasan dengan: Hutan Register 19 Wan Abdul Rahman
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Cermin Kecamatan Padang Cemin
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Way Urang, Desa Hanau Berak Kecamatan Padang Cermin.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Paya Kecamatan Padang Cermin dan Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai.

Kolaborasi Model Pentahelix dan Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya

Pada tahap Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay parameter yang dilihat adalah bagaimana keterlibatan berbagai aktor untuk bekerjasama dalam melakukan optimalisasi pengembangan di desa wisata Harapan Jaya dan menciptakan nilai tambah produk pariwisata yang menggambarkan karakteristik ciri khas atas keunikan produk dari desa wisata Harapan Jaya yang membedakan dari pariwisata lainnya. Karakteristik ciri khas produk pariwisata yang dimaksud adalah yang berkenaan dengan potensi desa wisatanya seperti pengelolaan usaha-usaha kerajinan lokal yang menjadi ciri khas budaya daerah, destinasi wisata air terjun, pengelolaan usaha kuliner khas daerah, pengelolaan usaha penginapan, dan juga pengelolaan usaha berupa warung dan toko-toko untuk kebutuhan untuk kehidupan sehari-hari.

Saling Ketergantungan

Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Saling Ketergantungan adalah salah satu tolak ukur untuk melihat optimalnya sebuah pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya, Menurut (Grey, 1989) dalam melihat terciptanya kolaborasi salah satunya melalui komponen saling ketergantungan dalam dunia pariwisata. Maka dari itu dalam sebuah penelitian ini peneliti menuliskan menurut hasil observasi penelitian Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya optimal sesuai dengan teori saling ketergantungan, yang dimana menurut stakeholder pariwisata untuk menumbuhkan rasa ketergantungan antar aktor perlunya pemberdayaan terutama SDM, budaya dan mainset yang sama agar memahami Proporsionalitas dan Kelemahan tiap aktor untuk ambil bagian sesuai dengan fungsinya masing-masing dalam mengembangkan Desa Wisata Harapan Jaya. Se jauh ini, masyarakat, pemerintah, akademisi, komunitas dan media masih belum terlalu eksis Dalam Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya maka dari itu perlunya menumbuhkan kesadaran antar aktor karena sejauh ini tingkat kesadaran kita dalam dunia pariwisata masih sangat rendah, masih saling bekerja sendiri (swadaya) karna menurut pengakuan kelompok sadar wisata (POKDARWIS) sendiri untuk meningkatkan saling ketergantungan terhadap aktor lain itu masih belum ada karena memang belum adanya kolaborasi dengan pihak-pihak terkait namun pihak POKDARWIS juga tidak ingin dengan adanya ketergantungan terhadap pihak lain; inovasi dan kreativitas mereka tidak berkembang.

Penyatuan Pemikiran Secara Konstruktif Untuk Mencapai Solusi

Komponen yang kedua Menurut (Gray, 1989) untuk terciptannya sebuah kolaborasi yaitu melalui penyatuan pemikiran secara konstruktif untuk menyamakan visi & misi dan mendapatkan solusi dalam pengembangan. Desa Wisata Harapan Jaya sejauh ini masih sangat perlu di perhatikan dan memerlukan banyak ide serta inovasi dalam upaya mengembangkan Desa Wisata Harapan Jaya, maka dari itu peran kolaborasi berbagai komponen sangat penting dalam upaya pengembangan desa wisata yang berbasis budaya untuk memberi masukan dan gagasan pola pikir yang kreatif dalam membangun

sebuah kawasan desa wisata.

Namun sejauh ini dari hasil observasi penelitian, peneliti menjabarkan problem yang sering di temukan dalam membangun kolaborasi pariwisata dalam desa wisata Harapan Jaya, kurangnya kesadaran dalam bekerjasama dalam bidang pariwisata dengan aktor lain sehingga belum optimalnya kerjasama dalam menyatukan pola pikir dalam pengembangan desa wisata itu sendiri karena belum ada visi dan misi yang sama, maka dari itu partisipasi dari pihak lain tentu membawa dampak positif bagi pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya karena banyaknya partisipasi tentu akan menambah tingkat kepedulian terhadap pariwisata. Namun demikian tidak melupakan adanya dampak negatif juga, karna dalam menjalin kolaborasi tidak hanya modal tanda tangan di atas kertas saja, tetapi juga ada beban moral dan tanggung jawab serta tantangan yang di hadapi kedepannya, salah satunya adalah konsistennya aktor lain yang siap bekerjasama dan tantangan menyatukan pola pikir berbagai aktor karna tentunya dengan partisipasi yang banyak mempunyai pola pikir yang berbeda- beda, maka dari itu solusi untuk mengatasi berbagai konflik agar sejalan dengan apa yang di harapkan harus mengadakan pertemuan rutin minimal 1 kali dalam 2 minggu yang di adakan oleh pihak pariwisata, dengan adanya tatap muka akan menjalin silaturahmi berbagai komponen untuk saling sharing dan ngobrol santai untuk berbicara tentang perencanaan, pengeloan serta bagaimana kelanjutan program pariwisata untuk kedepannya untuk menyatukan pola pikir yang konstruktif berbagai komponen.

Keputusan Bersama Semua Aktor (*Joint Ownership of Decisions*)

Konsep yang ketiga menurut (Gray, 1989) kolaborasi tercipta berdasarkan keputusan bersama antar aktor dalam penentuan kebijakan. Sejauh ini dari hasil observasi penelitian yang di lakukan di Desa Wisata Harapan Jaya sudah mulai terlihat dengan adanya Musrenbang dalam pembangunan pariwisata dengan mengundang tokoh-tokoh, pihak kelurahan, dinas pariwisata, akademisi, media, dan swasta serta kalangan lain yang terlibat dalam Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran ini. Namun demikian, sejauh ini memang masih belum optimal dari segi pertemuan sehingga untuk pengambilan keputusan masih belum berdasarkan kesepakatan bersama, karena memang sejauh ini berjalan nya pariwisata hanya swadaya dan hanya beberapa komponen saja yang terlibat, maka dari itu pentingnya meningkatkan silaturahmi visi dan misi dalam dunia pariwisata sebagai pengoptimalan pengembangan dari Kolaborasi Desa Wisata Harapan Jaya.

Sejauh ini komunikasi yang kurang lancar menjadi penyebab kurang optimalnya pengambilan keputusan bersama semua aktor, karena kepedulian teradap dunia pariwisata masih perlu di tingkatkan maka dari itu pentingnya pertemuan tatap muka, selain untuk mempermudah komunikasi, salah satu upaya untuk menjalin hubungan silaturahmi yang baik antar komponen. Selanjutnya untuk Desa Wisata Harapan Jaya adalah lebih fokus terhadap musyawarah antar kompenen dan aktor lain membuka rapat informal ataupun acara rapat formal sebagai wadah menampung masukan dan evaluasi

untuk membangun kolaborasi yang optimal. Selain itu juga harus adanya keterbukaan informasi maupun menyampaikan masukan-masukan yang dapat di terima maupun yang tidak dapat di terima, untuk saling menghargai/menghormati antar pendapat aktor lain sehingga komunikasinya berjalan lancar dan kolaborasinya dapat terjalin dengan baik

Tanggung jawab bersama

Keempat menurut (Gray, 1989) Konsep Kolaborasi merupakan bahwa pariwisata bukan lagi hanya tanggung jawab dari satu pihak melainkan membangun tanggung jawab bersama antar berbagai pihak. Dari hasil penelitian observasi konsep tersebut sudah berjalan sesuai dengan kondisi lapangan. Namun demikian, untuk konsep tanggung jawab sejauh ini masih belum ada hukum yang mengikat artinya berdasarkan (MOU) kerjasama. Se jauh ini kerjasama dalam desa wisata hanya beberapa pihak saja yang terjalin kolaborasi karna memang pentingnya sosialisasi sebagai salah satu untuk meningkatnya orang-orang yang berpartisipasi dalam desa wisata sei gohong. Menurut beberapa stakeholder yang bergerak dalam bidang pariwisata sejauh ini memang belum ada kerjasama yang secara resmi akan tetapi secara pribadi itu selalu mensupport pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya demi kemajuan Desa Wisata kita. Dan sejauh ini profesionalitas dan tanggung jawab dari berbagai kalangan itu terlihat dan dibuktikan dengan sejauh ini masih satu visi untuk mengenalkan Desa Wisata dan masih bisa di arahkan sebagai patner kerja desa wisata, namun memang perlu proses yang sangat panjang karena Desa Wisata Harapan jaya masih punya pekerjaan rumah, untuk bisa mengenalkan Desa Wisata Harapan Jaya dan menjual produk-produk yang unik yang menjadi perhatian publik, walaupun dengan masalah anggaran yang masih minim akan tetapi sejauh ini pengembangan komitmen dan profesionalisme dari kawasan ramah kunjungan terus di angkat dan di optimalkan.

Kesimpulan dan Saran

Demi meningkatkan Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya yang optimal perlu mendapatkan perhatian khusus, karena melihat dari rendahnya kesadaran kolektif berbagai aktor terhadap sikap abai, selalu menunggu arahan, dan kurangnya komunikasi antar aktor mengenai Desa Wisata Harapan Jaya . Rendahnya kemampuan pendanaan dan manajemen serta kreativitas sumber daya manusia (SDM) yang terampil dalam mengupayakan pembuatan produk- produk industri lokal kepariwisataan terutama menyangkut industri kerajinan tangan dan cendera mata juga mempengaruhi tingkat kurang optimalnya kolaborasi pentahelix dalam pengembangan desa wisata Harapan Jaya Namun demikian sejauh ini hadirnya desa wisata juga membawa dampak yang positif, pembukaan lapangan kerja baru, pelestarian lingkungan dengan kawasan yang berbudaya tradisional yang masih asri, walaupun sejauh ini dalam pengembangan Desa Wisata Harapan Jaya masih belum sepenuhnya menjual keasrian lokalnya yang ada di kawasan Desa Wisata tersebut. Oleh karena itu, pentingnya Kolaborasi Model *Pentahelix*, dengan adanya keterlibatan

Akademisi, Swasta, Komunitas, Pemerintah dan Media sangat lah penting untuk penunjang wisata kedepannya. namun sejauh ini ini untuk kerjasama itu masih belum optimal di ukur dari saling ketergantungan antar aktor, penyatuan pemikiran secara konstruktif, keputusan bersama, dan tanggung jawab bersama, hanya pihak-pihak tertentu saja yang terlibat dalam kolaborasi tersebut, sehingga nantinya ada perjanjian ataupun regulasi secara khusus untuk mengatur komponen-kompenen tersebut bisa bekerjasama secara resmi dalam mengupayakan Kolaborasi Model *Pentahelix* Dalam Pengembangan Desa Wisata Harapan jaya Kecamatan Way Ratay Kabupaten Pesawaran ini

SARAN

1. Adanya regulasi khusus sebagai faktor pendukung terjalinnya kolaborasi *pentahelix*.
2. Program pembinaan berkelanjutan melalui pelatihan-pelatihan, sangat penting untuk dilakukan, terutama berkaitan dengan pembinaan terhadap pengolahan dan pemasaran produk unggulan destinasi wisata setempat, termasuk bantuan anggaran
4. Koordinasi secara berkelanjutan bersama aktor-aktor *pentahelix* dalam pelaksanaan berbagai event pariwisata

Daftar Pustaka

- Agranoff, Robert & Michael McGuire. 2003. *Collaborative Public Management: New Strategies for Local Governments*. Washington DC: Georgetown University Press.
- Ansell, Chris, & Alison Gash. 2007. *Collaborative Governance in Theory and Practice*, *Journal of Public Administration Research and Theory*, Vol.18 No.4, Hlm. 543-571.
- Friedman, Andrew L. dan Samantha Miles. 2006. *Stakeholders: Theory and Practice*. New York: Oxford University Press.
- Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Pedesaan Berbasis Masyarakat Sebuah Pendekatan Konsep*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Lindmark, A., Stureson, E., dan Ross. 2009. *Difficulties of Collaboration for Innovation*. Land University
- Liu, Juanita C. 1994. *Pacific Islands Ecotourism: A Public Policy and Planning Guide*. Hawai'i: The Pacific Business Center Program. Collage of Business Administration University of Hawai'i at Manoa, Honolulu USA.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rema Rosadakarya.
- Pitana, I Gde dan I Ketut Surya Dinata. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- Prasiasa, Dewa Putu Oka. 2013. *Destinasi Pariwisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Richardson, John I and Martin Fluker. 2004. *Understanding and Managing Tourism Australia*. NSW: Pearson Education.
- Sugiono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Alfabeta, CV.
- Yoeti, H. Oka A. 2016. *Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata*. Jakarta: Penerbit PT Balai Pustaka (Persero).
- Wood & Gray, 1991. *Merriam-Webster. Dictionary and Thesaurus*. Halaman Tersedia: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/collaboration>.

Jurnal:

- Muhyi, H. A., Chan, A., Sukoco, I., & Herawaty, T. (2017). *The Pentahelix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City*. *Review of Integrative Business and Economics Research*, 6(1), 412- 417. Halaman tersedia https://sibresearch.org/uploads/3/4/0/9/34097180/riberth16-131_412-417.pdf. [9 Agustus 2021)
- Subiantoro, Jhevenda Rafael. 2019. *Kolaborasi Antar Stakeholder Dalam Program One Village One Product Kendang Jimbe di Kota Blitar*. (Jurnal), 5 (15), 15 halaman. Tersedia <http://repository.unair.ac.id/eprint/83427>. [20 Agustus 2021].
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata